Jokowi Teken Keppres, Berikut Tanggal Cuti Bersama untuk ASN

JAKARTA (IM) – Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menandatangani Keppres entang cuti bersama pegawai aparatur sipil negara (ASN) tahun 2023.

Keppre nomor 8 tahun 2023 tentang perubahan atas Keputusan Presiden nomor 24 tahun 2023 tentang Cuti Bersama pegawai aparatur sipil negara tahun 2023, ditetapkan di Jakarta pada 13 April 2023.

"Bahwa dalam rangka mewujudkan efisiensi dan efektivitas hari kerja serta memberi pedoman bagi instansi pemerintah dalam melaksanakan cuti bersama tahun 2023; bahwa dalam rangka meningkatkan keselamatan, keamanan, ketertiban, dan kelancaran mobilitas pada arus mudik Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah, perlu dilakukan perubahan tanggal cuti bersama bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara tahun 2023," bunyi pertimbangan dalam Keppres tersebut dikutip pada Kamis (13/4).

Pada tanggal 19, 20, 21, 24, dan 25 April 2023 (Rabu, Kamis, Jumat, Senin, dan Selasa) sebagai cuti bersama Hari Raya ldul Fitri 1444 Hijriah. Kemudian, 2 Juni 2023 (Jumat) sebagai cuti bersama Hari Raya Waisak.

Lalu, pada 26 Desember 2023 (Selasa) sebagai cuti bersama Hari Raya Natal. ● **han**

KPK Kembali Perpanjang Masa Penahanan Rafael Alun Trisambodo

JAKARTA (IM) - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memperpanjang masa tahanan Rafael Alun Trisambodo (RAT). Rafael ditetapkan tersangka penerimaan gratifikasi terkait pemeriksaan perpajakan di Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kemenkeu.

"Terkait dengan masih diperlukannya waktu untuk terus melakukan pengumpulan alat bukti, Tim Penyidik melanjutkan penahanan tersangka RAT untuk 40 hari ke depan," kata Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Kamis (13/4).

Alu membeberkan, perpanjangan masa tahanan itu terhitung sejak 23 April 2023 hingga 1 Juli 2023. Adapun penahanan Rafael akan dilakuka. Di Rutan KPK.

Lebih lanjut, Ali mengimbau para saksi dapat kooperatif guna memudahkan proses penyidikan.

"KPK mengimbau berbagai pihak untuk hadir dan kooperatif memenuhi panggilan Tim Penyidik," terang Ali.

Diketahui sebelumnya, KPK telah menetapkan Rafael Alun sebagai tersangka penerimaan gratifikasi terkait pemeriksaan perpajakan di DJP. Rafael diduga menerima gratifikasi sebesar 90 ribu Dollar Amerika Serikat atau setara Rp1,34 miliar.

Rafael Alun menerima uang sebesar Rp1,34 miliar tersebut selama bertugas di DJP Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Gratifikasi tersebut diduga berkaitan dengan pemeriksaan perpajakan pada Ditjen Pajak Kemenkeu.

Rafael diduga menerima gratifikasi melalui perusahan jasa konsultansi perpajakan miliknya yakni, PT Artha Mega Ekadhana (PT AME). Ia disebut aktif menawarkan perusahaannya kepada wajib pajak yang mempunyai masalah perpajakan.

Atas perbuatannya, Rafael disangkakan melanggar Pasal 12B Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001.

Sejauh ini, KPK belum menjerat Rafael Alun sebagai tersangka Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Tapi, KPK membuka peluang untuk menjerat Rafael sebagai tersangka pencucian uang jika ditemukan bukti permulaan yang cukup. ● **mei**

DPR Sebut Selesaikan 11 UU pada Masa Sidang IV

JAKARTA (IM) - Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, DPR sudah menyelesaikan 11 Rancangan Undang-Undang (RUU) menjadi Undang-Undang (UU) pada masa sidang IV, yang ditutup pada hari ini, Kamis (13/4).

Hal itu disampaikan Dasco saat membacakan pidato Ketua DPR Puan Maharani yang terlihat tidak hadir dalam rapat paripurna.

"Dalam melaksanakan fungsi di bidang legislasi, pada masa persidangan ini, DPR RI bersama pemerintah telah menyelesaikan 11 RUU menjadi UU," kata Dasco dalam rapat, Kamis (13/4).

"Dua di antaranya adalah penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang cipta kerja, dan penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum," ujarnya.

Namun, Dasco tak menyebut RUU lainnya yang diklaim sudah diselesaikan DPR menjadi UU. Dasco lebih lanjut mengatakan bahwa DPR disebut telah menetapkan RUU tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) sebagai usul inisiatif DPR.

Menurut Dasco, DPR akan membahas RUU PPRT itu secara komprehensif dengan memerhatikan masukan serta aspirasi berbagai pihak. "RUU ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan hukum nasional kita dan memberikan kepastian hukum bagi pekerja rumah tangga," katanya.

Di sisi lain, Dasco membacakan bahwa DPR terus melakukan monitoring terkait Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Hal itu dilakukan agar APBN berjalan sesuai dengan sasaran rencana kerja pemerintah tahun 2023, yaitu peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

"Realisasi anggaran hingga triwulan satu ini sudah berjalan baik, namun masih terdapat beberapa catatan yang perlu menjadi perhatian pemerintah selain cepat tepat dan efektif," ujar Dasco. ● **mei**

FOTO: ANTARA

RAPAT PARIPURNA DPR
Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono (kiri) memberikan dokumen pandangan pemerintah terkait pengesahan RUU tentang Landasan Kontinen kepada Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad (kedua kanan) disaksikan Rachmat Gobel (kanan) dan Lodewijk Freidrich Paulus (kedua kiri) saat Sidang Paripurna DPR ke-21 Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2022-2023 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (13/4). Dalam Rapat Paripurna tersebut Pimpinan dan Anggota DPR menyetujui Rancangan Undang - Undang (RUU) tentang Landasan Kontinen serta menutup masa persidangan IV Tahun Sidang 2022-2023.

Koalisi Besar akan Berembuk dengan Jokowi soal Sosok Capres 2024

Golkar menyebutkan sejak awal pertemuan lima parpol Koalisi Besar belum pernah membahas soal nama Ketum Partai Politik.

JAKARTA (IM) - Ketua DPP Partai Golongan Karya (Golkar), Ace Hasan Syadzily mengungkapkan Koalisi Besar akan berembuk dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait sosok Calon Presiden (Capres).

Ace mengatakan hal itu kepada para wartawan di Kantor DPP Partai Golkar Slipi Jakarta Barat, Rabu (12/4), usai menerima kedatangan silahturahmi dari petinggi Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

"Sejauh ini PSI kan mengatakan dia akan ikut dengan Presiden Jokowi, tidak spesifik mengatakan bahwa PSI akan (mendukung) Ganjar. PSI akan menunggu arahan dari Presiden Jokowi. Termasuk saya kira di koalisi besar ini juga tentu akan bersama-sama dengan Presiden untuk membahas siapa figur yang tepat. Yang jelas, Golkar harus ada di situ," ujar Ace Hasan Syadzily.

Ace menyebutkan sejak awal pertemuan lima parpol Koalisi Besar belum pernah membahas soal nama Ketum Partai Politik. "Tetapi saya kira apa yang dilakukan oleh para ketua umum partai cocok, beliau (Presiden Jokowi) mengapresiasi, menyambut dengan positif terhadap koalisi besar ini," jelas Ace.

Dalam menentukan arah dukungan, Ace meyakini Presiden Jokowi dapat menempatkan diri dalam konteks partai politik. Apalagi Koalisi Besar yang tengah dibangun juga berasal dari jajaran pemerintah.

"Pak Prabowo dengan Pak Airlangga tidak bisa juga dipisahkan untuk membahas urusan-urusan pemerintahan gitu. Tapi yang jelas bahwa komunikasi antara pak Airlangga dengan Pak Prabowo sangat intens apalagi beliau sama-sama juga menjadi pembantu Presiden Jokowi," pungkas Ace Hasan Syadzily.

Perihal sosok yang dijagokan menjadi Capres-Cawapres Koalisi Besar, Ace meminta awak media untuk menunggu pada waktunya akan diumumkan.

"Ini kan jelas KIB (Koalisi Indonesia Bersatu) punya, KKIR (Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya) juga punya, jadi bisa dilihat lah. Kita harapkan ya masing-masing tentu memiliki representasinya dalam konteks penempatan figur capres dan cawapresnya," pungkas Ace Hasan Syadzily.

Sebagaimana diketahui sebelumnya, pimpinan lima partai yakni Partai Gerindra, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Golkar, Partai Amanat Nasional, dan Partai Persatuan Pembangunan berencana untuk membangun koalisi besar dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Hal itu disampaikan Ketum PAN Zukifli Hasan (Zulhas), Ketum Gerindra Prabowo Subianto, dan Ketum Golkar Airlangga Hartarto saat melaksanakan silahturahmi partai politik pendukung pemerintah bersama Presiden Jokowi dalam momen Idul Fitri 1444H/2023M di Kantor DPP Partai Amanat Nasional (PAN) pada Minggu (2/4) silam.

Selain lima partai politik parlemen, setidaknya hingga saat ini sudah ada dua partai politik lainnya yang menyatakan diri berminat dan ingin bergabung dengan Koalisi Besar, yakni Partai Persatuan Indonesia (Perindo) dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI). ● **han**

Penetapan Idul Fitri antara Muhammadiyah dengan NU Diperkirakan Beda Lagi Tahun Ini

JAKARTA (IM) – Penetapan jadwal Idu Fitri 144 H antara Muhammadiyah dan Nadhlatul Ulama (NU) diperkirakan tidak akan sama pada tahun ini. Soalnya, ketinggian hilal berdasarkan matahari terbenam, tetapi masih di bawah kriteria minimum imkanur rukyah (visibilitas).

Ketua Lembaga Falakiyyah Pengurus Besar Nahdatul Ulama (PBNU) KH Sirril Wafa mengatakan, perbedaan itu perlu disikapi dengan saling memahami satu sama lain. Kesalingpahaman ini, bisa tumbuh dengan mengetahui akar perbedaannya.

"Karena perbedaan Indonesia seperti ini sudah berkali berulang dan menjadi tidak asing lagi bagi umat Islam," ujar Sirril dalam laman resmi NU Online, Kamis (13/4).

"Maka saatnya masing-masing anggota kelompok yang berbeda memahami akar perbedaannya, dan tidak ambil sikap apriori. Sebab dengan mengetahui duduk persoalannya, diharapkan satu sama lain bisa saling memahami,"katanya.

Sirril menambahkan, Ia tidak mau perbedaan tersebut seakan-akan menjadi identitas yang justru malah diperdebatkan. "Jangan sampai perbedaan ini mengkristal menjadi identitas permanen," tuturnya.

Menurutnya, jika masing-masing sudah bisa saling memahami perbedaan, mereka harus menemukan satu titik kesamaan sehingga tidak timbul ego kelompok sendiri.

"Kalau semua bisa paham bahwa perbedaan ini sejatinya bukan termasuk masalah pokok, tapi hanya pada tingkat persoalan cabang atau furu'iyah, yang pada dasarnya teks-teks agama atau nash yang menjadi rujukan adalah sama," ujarnya.

"Maka harus ada upaya peningkatan pemahaman lanjutan yang memungkinkan pencarian solusi untuk sama-sama bergerak menuju titik temu tanpa tonjolkan ego golongan," katanya.

Sebagai informasi, data bulan tanggal 29 Ramadhan 1444 H atau 20 April 2023 berdasarkan markaz Jakarta menunjukkan ketinggian hilal masih berada pada 1 derajat 55 menit 43 detik dan elongasi 3 derajat 18 menit 23 detik dengan waktu hilal berlangsung selama 9 menit 29 detik. Sementara ijtimak terjadi pada Kamis Legi, 20 April 2023 pada pukul 11.16.38 WIB. ● **han**

Banding Ditolak, PT DKI Tetap Menghukum Mati Ferdy Sambo

JAKARTA (IM) – Permohonan banding yang diajukan Ferdy Sambo ditolak majelis hakim Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta. Hakim tingkat banding justru kuatkan putusan Pegadilan tingkat pertama, Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan (Jaksel) yyang menghukum mati Ferdy Sambo.

PT DKI juga menolak banding yang diajukan oleh terdakwa Putri Candrawathi, Ricky Rizal Wibowo, dan Kuat Maruf.

Majelis hakim mengatakan, eks Kepala Divisi Propam Polri itu, tetap dijatuhi hukuman mati akibat melakukan pembunuhan berencana terhadap Brigadir J. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta meyakini, Ferdy Sambo telah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dengam membunuh Brigadir J.

"Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tertanggal 13 Februari 2023," ujar Ketua Majelis Hakim Singgih Budi Prakoso, saat bacakan amar putusan di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, Rabu (12/4).

Hal yang sama juga berlaku untuk Putri Candrawathi. Istri Ferdy Sambo itu tetap dijatuhi vonis 20 tahun penjara karena terlibat dalam pembunuhan berencana Brigadir J.

Terdakwa lainnya, Ricky Rizal juga dinyatakan tetap dijatuhi hukuman 13 tahun penjara. Ricky telah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pembunuhan Brigadir J.

"Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 799/Pid.B/2022/PN JKT.SEL tanggal 14 Februari 2023 yang dimintakan banding tersebut," kata Ketua Majelis Hakim H Mulyanto saat bacakan amar putusan di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, Rabu.

Hal senada juga berlaku untuk Kuat Maruf. Bandingnya ditolak oleh PT DKI Jakarta. Dengan demikian putusan dari PT DKI jakarta hanya menguatkan vonis hukuman 15 tahun penjara yang telah dijatuhkan PN Jaksel kepadanya. ● **han**

FOTO : ANT

SIDANG PLEDOI TEDDY MINAHASA
Terdakwa kasus dugaan peredaran narkoba jenis sabu-sabu Irjen Pol Teddy Minahasa (kiri) mengikuti sidang lanjutan di PN Jakarta Barat, Jakarta, Kamis (13/4). Sidang mantan Kapolda Sumatera Barat yang diduga menjual barang bukti sabu-sabu seberat 5 kilogram itu beragenda mendengarkan nota pembelaan terdakwa atau pledoi.

PENGUMUMAN

Dengan ini diumumkan bahwa **PT MITRA PERMAI LESTARI**, berkedudukan di Jakarta Utara ("**Perseroan**"), berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham (Diluar Rapat) tertanggal 10 April 2023, Nomor 07, yang dibuat dihadapan ANDREAS, SH.,LL.M, Notaris di Kota Bogor, yang memutuskan :

-Perubahan/Penurunan Modal Dasar Perseroan yang semula sebesar Rp. 89.958.000.000,- (Delapan Puluh Sembilan Milyar Sembilan Ratus Lima Puluh Delapan Juta Rupiah) menjadi sebesar Rp. 57.780.000.000,- (Lima Puluh Tujuh Milyar Tujuh Ratus Delapan Puluh Juta Rupiah).

-Perubahan/Penurunan Modal Disetor Perseroan yang semula sebesar Rp. 81.780.000.000,- (Delapan Puluh Satu Milyar Tujuh Ratus Delapan Puluh Juta Rupiah) menjadi sebesar Rp. 57.780.000.000,- (Lima Puluh Tujuh Milyar Tujuh Ratus Delapan Puluh Juta Rupiah).

-Apabila terdapat pihak-pihak yang berkepentingan atas tindakan Perseroan tersebut dapat mengajukan surat secara tertulis pada Kantor Perseroan.

TTD
Direktur Perseroan

PENGUMUMAN

Dengan ini diumumkan bahwa **PT BINTANG DHARMAWANGSA PERKASA**,berkedudukan di Jakarta Utara ("**Perseroan**"), berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham (Diluar Rapat) tertanggal 10 April 2023, Nomor 08, yang dibuat dihadapan ANDREAS, SH.,LL.M, Notaris di Kota Bogor, yang memutuskan :

-Perubahan/Penurunan Modal Dasar Perseroan yang semula sebesar Rp. 58.415.500.000,- (Lima Puluh Delapan Milyar Empat Ratus Lima Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) menjadi sebesar Rp. 37.105.000.000,- (Tiga Puluh Tujuh Milyar Seratus Lima Juta Rupiah).

-Perubahan/Penurunan Modal Disetor Perseroan yang semula sebesar Rp. 53.105.000.000,- (Lima Puluh Tiga Milyar Seratus Lima Juta Rupiah) menjadi sebesar Rp. 37.105.000.000,- (Tiga Puluh Tujuh Milyar Seratus Lima Juta Rupiah).

-Apabila terdapat pihak-pihak yang berkepentingan atas tindakan Perseroan tersebut dapat mengajukan surat secara tertulis pada Kantor Perseroan.

TTD
Direktur Perseroan

PENGUMUMAN
ANNOUNCEMENT
PENGURANGAN MODAL PT TATA HAMPARAN EKA PERSADA
PT TATA HAMPARAN EKA PERSADA CAPITAL REDUCTION

PT TATA HAMPARAN EKA PERSADA (Perseroan) suatu Perseroan Terbatas yang berkedudukan di Kabupaten Bangka, dengan ini mengumumkan bahwa Perseroan akan melakukan pengurangan modal ditempatkan dan disetor dengan cara penarikan kembali dan pembatalan sebagian saham ("**Pengurangan Modal**").

***PT TATA HAMPARAN EKA PERSADA (Company)**, a limited liability company domiciled in Bangka Regency, hereby announces that the Company will reduce its issued and paid-up capital by way of withdrawing and cancelling partial shares ("**Capital Reduction**").*

Bagi pihak-pihak yang berkepentingan, khususnya para kreditor Perseroan, dapat mengajukan keberatan secara tertulis disertai alasannya kepada Perseroan atas keputusan pengurangan jumlah modal ditempatkan dan disetor, dengan tembusan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam waktu 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal pengumuman ini dengan ditujukan kepada:

The concerned parties, particularly the Company's creditors, may submit a written objection along with its reasons to the Company regarding the decision to reduce the amount of issued and paid-up capital, with a copy to the Minister of Law and Human Rights, within 60 (sixty) days from the date of this announcement to:

PT TATA HAMPARAN EKA PERSADA
Jalan Dokter Soetomo (Bukit Tabir), Desa Air Duren,
Kecamatan Pemali, Kabupaten Bangka

Pengumuman ini dimuat dalam rangka pemenuhan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Pasal 44 ayat (2) dan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

This announcement is published in order to comply with the provisions of the applicable laws and regulations, namely Article 44 paragraph (2) and Article 45 paragraph (1) of Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies as amended by Law Number 6 of 2023 concerning Stipulation of Government Regulation in lieu of Law Number 2 of 2022 concerning Job Creation into Law.

Bangka, 14 April 2023
Direksi
Board of Directors
PT TATA HAMPARAN EKA PERSADA

PENGUMUMAN
PT. PHOENIX CHARTA INDONESIA
(DALAM LIKUIDASI)

Sehubungan dengan penyelesaian (likuidasi) harta kekayaan Perseroan, Likuidator telah memenuhi seluruh kewajiban kepada pihak ketiga dan tidak ada sisa pembagian kekayaan hasil likuidasi kepada Para Pemegang Saham.

Pengumuman ini dilakukan guna memenuhi ketentuan Pasal 149 UU No. 40 Th 2007.

Bogor, 12 April 2023
Likuidator

PEMBERITAHUAN KETIGA

Mengundang
Bp. Hengky Alexander Abutan
Selaku Pemilik Rumah
Jl.Ayapana No.12 Green Valley
Sentul City Bogor, Untuk
Menghadap PT Sentul City, Tbk,
Kantor Pemasaran, Jl. MH
Thamrin Kav 8, Sentul City Bogor,
Guna Menyelesaikan Proses
Administratif Pengalihan Hak.